

Analisis E-Government Assesment Pada Situs Website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ari Fianto, Nuning Tri Hastuti, Sarli Assajdah, Izzul Fatchu Reza
Politeknik STIA LAN Jakarta

Email: arvee1453@gmail.com, alhiezone@gmail.com, nuning106@yahoo.com,
izzul.reza@stialan.ac.id

ABSTRACT

The application of E-government in the in Indonesia administration has a great potential to improve the quality of public services, increase transparency and accessibility of information. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) as one of the government agencies has encouraged the implementation of e-government through the construction and development of the KKP agency website/website. This study aims to assess how well is the KPP site to serve the citizens. In this study, e-government Assessment is used to assess KKP sites. The analytical method used is literature study and direct observation on the KPP site. From the results of the study and measurement of the E-government Assessment indicators, the KKP website can be said as very good for being a public service facility which is easily accessible and informative for the public.

Keywords: *e-government*

ABSTRAK

Penerapan E-government pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu instansi pemerintah telah mendorong implementasi e-government melalui pembangunan dan pengembangan situs / website instansi KKP. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa baik situs KKP sebagai jembatan fasilitas layanan publik. Dalam penelitian ini menggunakan E-government Assessment untuk menilai situs KKP. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan studi literatur dan pengamatan langsung pada situs KPP. Dari hasil kajian dan pengukuran indikator E-government Assessment, situs KKP sudah bisa dikatakan sangat baik untuk menjadi sarana layanan publik yang mudah diakses dan informatif bagi publik.

Kata Kunci: *e-government*

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat akan terbentuknya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan, mendorong pemerintah untuk segera melakukan perubahan terhadap proses bisnisnya, hal ini demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai salah satu upaya dalam percepatan mewujudkan *good governance* pemerintah melakukan pengembangan *e-government*. *E-government* merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lain yang terkait seperti masyarakat, pelaku bisnis dan instansi pemerintah lain. Adanya pengembangan *e-government* dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Inisiatif *e-government* oleh pemerintah pusat sudah mulai dilakukan sejak tahun 2001, dengan munculnya Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Komitmen pengembangan *e-government* dikuatkan kembali dengan munculnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, dimana diinstruksikan agar tiap instansi pemerintah melakukan perumusan strategi/action plan untuk lingkungan instansinya masing masing.

Esensi pengembangan *e-government* kian penting dengan adanya program reformasi birokrasi, yaitu proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Perlunya pengembangan *e-government* dalam reformasi birokrasi tertuang pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.11 tahun 2011 mengenai indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dimana salah satu indikator kinerja keberhasilan reformasi birokrasi adalah adanya pengembangan *e-government*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu instansi pemerintah juga memiliki kewajiban dalam mewujudkan komitmen pelaksanaan *e-government* melalui pembangunan dan pengembangan portal / website instansi KKP. Pengembangan website KKP diarahkan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* yang bertujuan untuk peningkatan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, dan transparan.

Dalam pengembangan website, tidak hanya menyangkut infrastruktur jaringan sebagai sarana komunikasi data dan aksesibilitas informasi tetapi juga menyangkut infostruktur (*content*) yang merupakan hal paling penting dari pengembangan website pemerintahan. Untuk mendapatkan sistem informasi manajemen pemerintahan yang baik dan handal, suatu sistem informasi harus terintegrasi dari semua bidang pemerintahan serta pertukaran data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (Sulistyo, dkk: 2008).

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan *E-government Assessment* yakni sebuah metode untuk menilai suatu sistem informasi, aplikasi, atau inisiatif *e-government* suatu institusi publik yang dalam hal ini situs website Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan perspektif konten dan manajemen sistem informasi dalam rangka pencapaian pelaksanaan Inpres no. 3 tahun 2003.

KAJIAN LITERATUR

Terdapat definisi *e-government* menurut beberapa sumber, The World Bank Group (2006), mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintah, seperti: *Wide Area Network*, *Internet*, dan *Mobile Computing*, yang mempunyai kemampuan untuk merubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan badan pemerintah lainnya.

Dijelaskan juga oleh Mark Forman (2005), pengertian *e-government* secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan TIK untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional.

Menurut Inpres No.3 Tahun 2003, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Inpres ini menginstruksikan agar tiap instansi pemerintah melakukan perumusan strategi/action plan.

METODE PENELITIAN

Kerangka Kerja dan Variabel *E-Government Assesment*

Dalam mengukur *e-government assessment* pada situs KKP, metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi literatur. Pengambilan data dilaksanakan dengan observasi, reduksi data, pengamatan dan analisis langsung terhadap website KKP, serta melakukan pengujian penilaian menggunakan kerangka kerja *E-government Assessment* menurut Swastika, dkk (2016).

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan Swastika, dkk (2016) terhadap 100 (seratus) situs website Pemerintah Daerah dan hasil wawancara dengan website developer yang merupakan rekanan dari Pemda dalam pembuatan situs website/aplikasi, variabel yang dapat diukur berdasarkan prespektif konten dan manajemen pada suatu situs website/aplikasi adalah sebagai berikut.

- a. Identitas Lembaga
Variabel identitas lembaga menjelaskan tentang Pemerintahan Daerah tersebut (nama lembaga, simbol, alamat, kontak informasi, serta domain).
- b. Konten
Variabel konten menjelaskan tentang keberadaan Pemda bersangkutan (profil, visi, misi, tupoksi, struktur organisasi, peraturan dan kebijakan, informasi pejabat, kolom berita, kolom artikel, lembaga terkait, konten kearifan lokal, jumlah hosted, jumlah link error, jumlah link pada website lain).
- c. Fitur
Variabel fitur pada situs website Pemda berisi fasilitas yang dapat digunakan oleh publik (bank data, data search, pilihan bahasa, layanan multimedia, data statistik pengunjung).
- d. Partisipasi Masyarakat
Variabel partisipasi masyarakat menjelaskan tempat untuk menerima masukan dari pengguna (kontak hubungi kami, forum diskusi, form pengaduan, fasilitas chatting).
- e. Kegunaan
Variabel kegunaan ini menjelaskan tentang tampilan situs website Pemda (peta situs, tulisan dan huruf, desain warna, penataan menu, penggunaan scroll bar, posisi pengunjung, kompatibel pada berbagai browser, versi mobile, validasi XHTML).
- f. Layanan
Variabel layanan menjelaskan tentang hubungan langsung antara sistem dengan pengguna (layanan pengadaan/LPSE link, Anggaran, elayanan/aplikasi pendaftaran, transaksi online).
- g. Aktivitas Media Sosial
Variabel ini menjelaskan keaktifan Pemda pada media sosial, karena hampir seluruh masyarakat memiliki media sosial (akun jejaring sosial, update berita pada akun, kualitas berita pada akun, jumlah folowers).
- h. Keamanan
Variabel kewanaman menjelaskan tentang sistem keamanan pada situs website tersebut (domain https).

Pendefinisian Kerangka Kerja dan Indikator *E-government Assesment*

Variabel dan indikator penilaian pendefinisian kerangka kerja *E-Government Assessment* pada situs website tertera pada **Tabel 1** berikut.

Tabel 1. Variabel Kerangka Kerja *E-government Assessment*

No	Variabel	Indikator Penilaian
1	Identitas Lembaga	Nama lembaga
		Simbol lembaga
		Alamat kantor lembaga
		Kontak Informasi lembaga
		Website menggunakan domain go.id
2	Konten	Profil lembaga
		Visi – Misi lembaga
		Tupoksi lembaga
		Struktur organisasi lembaga
		Informasi pejabat lembaga
		Peraturan/kebijakan yang dikeluarkan
		Data statistik tupoksi lembaga
		Kolom berita
		Indikator Penilaian
		Kolom artikel
		Memiliki link ke lembaga terkait
		Link website tercantum di website lain
		Jumlah hosted
		Jumlah link error
		Konten khusus kearifan local
3	Fitur	Fasilitas download file
		Fasilitas pencarian data / search
		Pilihan bahasa
		Memiliki layanan multimedia
		Fasilitas statistik pengunjung
4	Partisipasi Masyarakat	Menu kontak lembaga
		Forum diskusi
		Memiliki menu pengaduan / pertanyaan
		Fasilitas chatting
5	Kegunaan	Peta situs
		Tampilan website
		Validasi XHTML
6	Layanan	Pengumuman / informasi
		E-layanan berbasis web
7	Aktivitas Media Sosial	Memiliki akun jejaring sosial
8	Keamanan	Penggunaan https

Rubrik Penilaian Kerangka Kerja E-government Assessment

Analisis untuk menentukan skala pengukuran ini bertujuan agar kerangka kerja *E-government Assessment* dapat diukur sesuai dengan apa yang hendak diukur dan bisa dipercaya serta reliabel (konsisten). Pembobotan variabel dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan tingkat prioritas isi dari situs website pemerintah. Pembobotan variabel kerangka kerja E-government Assessment pada situs website tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Pembobotan Variabel

Nomor	Variabel	Bobot
1.	Identitas Lembaga	10%
2.	Konten	15%
3.	Fitur	15%
4.	Partisipasi Masyarakat	15%
5.	Kegunaan	15%
6.	Layanan	15%
7.	Aktivitas Sosial Media	10%
8.	Keamanan	5%

Selanjutnya menentukan rubrik penilaian instrument dari variable untuk mengklasifikasikan masing-masing variabel yang akan diukur agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data. Skala penilaian yang digunakan adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial yang selanjutnya disebut sebagai variabel. (Riduwan, 2007).

Rubrik penilaian kerangka kerja E-government Assessment pada situs website Instansi Pemerintah tertera pada Tabel 3.

Rumus Perhitungan tiap variable :

$$Vi = \frac{\sum Xi}{Yi} \times Z$$

$Vi = V$

$\sum Xi$ = Total Nilai

Yi = Jumlah item kuesioner

Z = Bobot variable

Tabel 3. Rubrik Penilaian

Kategori	Skor
Lengkap / Sangat baik	5
Kurang lengkap / Baik	4
Cukup lengkap / Sedang	3
Tidak lengkap / Buruk	2
Tidak ada / Buruk sekali	1

Skor yang diperoleh dari hasil penilaian kemudian diubah menjadi kriteria-kriteria yang menyatakan kondisi situs *website* tersebut. Kriteria interpretasi skor dapat dilihat pada Tabel 4. Rumus penghitungan :

$$Total\ Skor = \sum_i^n Vi \times 20\%$$

Tabel 4. Kriteria Interpretasi Skor

Skor (%)	Kriteria
81 - 100	Lengkap / Sangat baik
61-80	Kurang lengkap / Baik
41-60	Cukup lengkap / Sedang
21-40	Tidak lengkap / Buruk
0-20	Tidak ada / Buruk sekali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Lembaga

Daru hasil pengamatan, Website Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki identitas Lembaga yang mencakup indikator penilaian seperti nama lembaga, simbol lembaga, alamat kantor, kantor informasi, website informasi sudah tersedia.

1. **Nama Lembaga**, Pada menu home Website Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana setiap masuk kedalam menu pada website ini selalu terdapat nama lembaga dengan jelas.
2. **Simbol Lembaga**, Simbol lembaga pada Website Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dengan jelas oleh setiap pengguna website, dimana symbol lembaga tersebut selalu disertai dengan nama lembaga.
3. **Alamat Kantor Lembaga**, Alamat kantor lembaga telah tercantum pada bagian bawah kanan Website Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. **Kontak Informasi Lembaga**, pada Website Kementerian Kelautan dan Perikanan telah tercantum kontak informasi lembaga dengan jelas dan dapat dihubungi, posisi kontak informasi tersebut berada pada bagian bawah kanan website, adapun kontak informasi lembaga selalu berdampingan dengan alamat kantor lembaga.
5. **Website Lembaga**, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan Website yang telah menggunakan domain yang berbasis go.id.

Konten

Dari segi konten, secara umum Website Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memenuhi kaidah Parameter Website yang baik, dimana dalam website telah memiliki menu terkait Profil lembaga, Visi – Misi lembaga, Tupoksi lembaga, Struktur organisasi lembaga, Informasi pejabat lembaga, Peraturan/kebijakan yang dikeluarkan, Data statistik tupoksi lembaga, Kolom berita, Kolom artikel, Link ke lembaga terkait, Link website tercantum diwebsite lain serta Jumlah hosted.

Fitur

Dari fitur Website Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti fasilitas download file, *search*, bahasa, layanan multimedia, dan statistic pengunjung telah tersedia dengan lengkap dan mudah untuk di akses.

Partisipasi Masyarakat

Website Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki menu Saran dan pengaduan, dan fasilitas FAQ (*Frequently Asked Questions*) untuk membantu masyarakat dalam menjawab pertanyaan umum yang sering muncul dari pengunjung.

Kegunaan

Website Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki sistem Satu Peta yang didalamnya terdapat empat sub kategori meliputi Peta terkait Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Pengelolaan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana serta Potensi Kebencanaan. Tampilan Website telah didesain dengan Interface yang atraktif dan mudah dipahami.

Layanan

Website Kementerian Kelautan dan Perikanan banyak menyediakan layanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Perikanan dan Kelautan khususnya, seperti layanan informasi yang selalu update setiap waktu dan Layanan lainnya yang berbasis online.

Aktivitas Media Sosial

Website Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki akun media social seperti Instagram, twitter, dan facebook yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi lembaga agar menjangkau masyarakat, membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial, media sosialisasi strategi dan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan serta membangun interaksi antara lembaga dan masyarakat Kelautan dan Perikanan secara khusus.

Keamanan

Website Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menggunakan sistem keamanan dengan penggunaan Username dan Password untuk setiap akun yang menggunakan Website Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum, website KKP sudah sangat baik namun dalam beberapa variable perlu dilakukan penyempurnaan terutama pada aspek variable Partisipasi Masyarakat dan Layanan. Dari pengukuran dan perhitungan e-government assesment terhadap Website Kementerian Kelautan dan Perikanan diatas menghasilkan skor sebesar 86,8% maka dapat disimpulkan bahwa Website Kementerian Kelautan dan Perikanan menduduki kriteria dan layak menjadi fasilitas pelayanan publik yang Lengkap/Sangat Baik.

Saran

Untuk melakukan penilaian situs website menggunakan kerangka kerja E-Government Assessment ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami tentang pengukuran dan tujuan penilaian website agar dapat memberikan rekomendasi perbaikan secara khusus pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan upaya pelayanan masyarakat melalui system *E Government*. Diperlukan penguatan dan peningkatan pada beberapa variabel yang pertama pada variabel Partisipasi Masyarakat dimana website dapat melakukan aktifitas melalui forum diskusi secara interaktif antara pengelola website dengan pengunjung website, kemudian yang kedua diperlukan peningkatan fasilitas pada website yang bertujuan memberikan kemudahan pengguna website dalam melakukan pelayanan berbasis web dan memungkinkan pengguna melakukan aktifitas pendaftaran ataupun transaksi secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Forman, Mark. 2005. *E-Government: Using IT to transform the effectiveness and efficiency of government*.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Evolusi Strategi Integrasi Sistem Informasi Ragam Institusi*. Jakarta.
- Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. 2012. *Sisfonas 2010: Sisfonas Sebagai Tulang Punggung Aplikasi E-Government*. Jakarta: Kemenkominfo.
- Laman Website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <https://www.kkp.go.id/>.
- Putra, I. G. L. A. R., & Swastika, I. P. A. 2016. Analisis Kerangka Kerja E-Government Assesment pada Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia, dalam *Seminar Nasional Teknologi Informatika dan Komunikasi* (pp. 18-19).
- Ramadhani, dkk. 2020. E-Government Assesment pada Kualitas Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta, dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik* Volume 5 No. 2 Januari 2020.
- Sulistyo, D., Negara, P.H., Firdaus, Y. 2008. Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dalam *Prosiding Seminar Nasional Informatika, Yogyakarta, 24 Mei, 2008*, ISSN: 1979-2328.
- World Bank. *E-government for All – Review of International Experience with Enhancing Public*.